

THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) AND GENERAL ALLOCATION FUNDS (DAU) ON CAPITAL GOODS EXPENDITURE IN WEST PASAMAN

Asraf¹, M. Saleh Lubis², Zuhafni St. Parpatih³; Wila Sari⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasaman, Simpang Empat
drsasraf@yahoo.co.id,

ABSTRACT

Delegation of budget management authority to Regional Governments in the framework of regional autonomy provides flexibility for Regional Governments to plan and implement development for the welfare of the people. For this purpose, one of the important aspects in the APBD is capital expenditure. Capital goods are very urgent for improving welfare and as a stimulus for improving the economy of the community. Among the sources of funds to finance capital expenditure are Regional Original Revenues (PAD) and General Allocation Funds (DAU). Are there funds obtained from PAD and DAU that are factors that influence the policy for the procurement of capital goods? This study will look at whether in the West Pasaman Regional this happened. The data studied were the 2012-2016 Regional Budget (APBD). The research method was quantitative associative where the hypothesis was tested by multiple linear regression. The results showed that both PAD and DAU had no significant effect. This shows that the policies of the West Pasaman Regional Government in the procurement of capital goods are not directly related to the amount of revenue from the PAD or the transfer funds in the form of DAU. Many other factors have resulted in why PAD and DAU have no significant effect on the procurement of capital, such as emergency sector financing and priorities

Keywords: *Capital goods expenditure, Regional Original Revenues (PAD) and General Allocation Funds (DAU)*

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah berdasarkan Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membawa konsekuensi pada tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang harus semakin profesional. Kewenangan Pemerintah Daerah pada aspek pelayanan publik adalah sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengawasan, pengendalian pencapaian kinerja yang pembiayaannya dari APBD (Mulyawan, 2017).

Kewenangan yang besar dilimpahkan ke Pemerintah Daerah berupa otonomi itu membuka kesempatan dan keluwesan bagi pengelolaan pembangunan sesuai dengan hasrat dan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah. Berbagai sektor pembangunan di setiap daerah tentu berbeda satu sama lain sesuai kondisi daerah setempat. Kebijakan baru dibidang sistem keuangan negara ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dan pengalokasian secara efisien dan efektif. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya . Desentralisasi fiskal ini memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Pengalokasian terhadap belanja barang modal merupakan salah satu bentuk pelayanan pembangunan masyarakat dalam bentuk proyek fisik untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah yang memiliki peran sebagai stimulus bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Pembangunan infrastruktur fisik adalah salah satu objek pembangunan penting untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik. Pengadaan sarana dan prasarana itu demikian penting karena daintara fungsinya adalah sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan dan jembatan untuk membuka keterisolan suatu daerah sangat penting dalam menstimulasi pembangunan ekonomi daerah

tersebut. Hasil produksi daerah dimaksud dapat dibawa ke kota atau daerah padat lainnya yang memungkinkan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar karena dapat dijual dengan harga yang lebih mahal dan biaya transportasi yang lebih sedikit. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan kerja baik sebagai dampak langsung maupun tidak langsung.

Pengadaan barang-barang fisik berupa infrastruktur itu merupakan bagian dari pengadaan barang modal yang merupakan sebuah kelompok belanja pada APBD. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas perekonomian. Secara teoritis, karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2003). Selanjutnya penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik (Darwanto & Yustikasari, 2006). Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Tentu saja Pemerintah Daerah yang ingin mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakatnya berkeinginan agar secepatnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembangunan fisik semaksimal mungkin. Namun disisi lain ketersediaan sumber dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk DAU ataupun DAK memiliki keterbatasan. Karena keterbatasan ini maka salah satu upaya kongkrit yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah meningkatkan sumber dana dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Idealnya, Pendapatan Asli Daerah diprioritaskan untuk membiayai pengadaan barang modal di daerah. Dalam prakteknya meskipun Pimpinan Daerah memiliki konsep pembangunan sendiri untuk menyelenggarakan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun seringkali terdapat kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer & Khemani, 2003).

Diantara sumber dana APBD yang dipergunakan untuk membiayai pengadaan barang modal adalah dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan sumber dana sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagaimana pola atau kecenderungan perilaku pembiayaan pengadaan barang modal di Kabupaten Pasaman Barat hendak dianalisis pada penelitian ini. Apakah

PAD secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja modal akan memberikan gambaran apakah perilaku kebijakan pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa pendapatan sendiri berupa PAD diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan barang modal atau ada variabel lain yang mempengaruhi sehingga tidak selalu hasil dari PAD diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan barang modal. Disisi lain DAU sebagai salah satu sumber dana apakah secara langsung berpengaruh terhadap pengadaan barang modal, atau juga terdapat variabel lain atau faktor-faktor yang bersifat darurat situasional yang mengakibatkan porsi peruntukan DAU untuk membiayai barang modal dapat berubah-ubah sehingga tidak konsisten. Selain itu perlu juga diamati diantara PAD dan DAU mana yang paling konsisten diperuntukkan untuk pembiayaan pengadaan barang modal di Kabupaten Pasaman Barat.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2008). Yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah sesuai Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. PAD bermaksud kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai implementasi desentralisasi pemerintahan (Mulyawan, 2017). PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Di era desentralisasi, Pemerintah Daerah dituntut kemampuannya untuk memaksimalkan PAD masing-masing agar dapat semaksimal mungkin membiayai kebutuhan barang modalnya. Semakin tinggi PAD suatu daerah maka diharapkan akan semakin besar pula alokasi untuk belanja modalnya (Ardhani, 2011).

Kemandirian suatu daerah tercermin dari APBD-nya. Semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah berupa PAD, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah (Soekarwo, 2003).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang pengalokasiannya ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah (Mulyawan, 2017). Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana alokasi umum selanjutnya disebut adalah DAU yang dananya bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum sebagai salah satu bagian dari dana perimbangan yang ditunjukkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah. Menurut (Mardiasmo, 2010) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk dana alokasi umum kepada pemerintah daerah yaitu : 1) untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah, 2) untuk meningkatkan akuntabilitas 3) untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif 4) untuk meningkatkan pajak.

Dana alokasi umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan umum. Meskipun demikian pemerintah daerah dapat menggunakan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang di realisasikan melalui belanja modal

Belanja Moda

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal merupakan mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Menurut (Saragih: 2003 dalam Darwanto dan Yustikasari) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, perbaikan jalan umum dan lain-lain.

Menurut (Mardiasmo, 2010) belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional variabel dan pemeliharaannya.

Menurut Abdul (Halim, 2008) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan pengelolaan daerah menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai yang bermanfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Menurut peraturan pemerintah daerah No 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal digunakan untuk mendorong sarana dan prasarana suatu daerah yang bertujuan menunjang produktivitas masyarakat dan menunjang potensi suatu daerah. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan dan mesin, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

Masalah Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Kesulitan yang tengah dihadapi oleh berbagai kalangan pemangku kepentingan dalam mengalokasikan anggaran belanja modal diantaranya adalah terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Meskipun diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, pengelolaan keuangan merupakan salah satu mandat dari rakyat karena uang yang dimiliki pemerintah baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah seluruhnya adalah uang milik rakyat yang penggunaannya harus sampai untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Oleh karena itu, penggunaan dana hibah dari pemerintah pusat harus dialokasikan untuk sektor-sektor yang mengutamakan kepentingan publik yang dapat meningkatkan pemasukan bagi daerah. Rakyat dalam hal ini sebagai *principal* memiliki DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah agar segala kebijakan yang diambil pemerintah dapat mengutamakan kepentingan rakyat. Berbagai kendala yang sampai saat ini anggaran yang sangat tampak jelas tidak teralokasikan anggaran belanja modal itu sendiri yaitu disektor pertanian dan perdagangan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian menyangkut keterkaitan PAD dan DAU terhadap Belanja Modal sudah banyak dilakukan. Namun untuk objek penelitian di Kabupaten Pasaman Barat belum pernah ada sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian ini antara lain adalah :

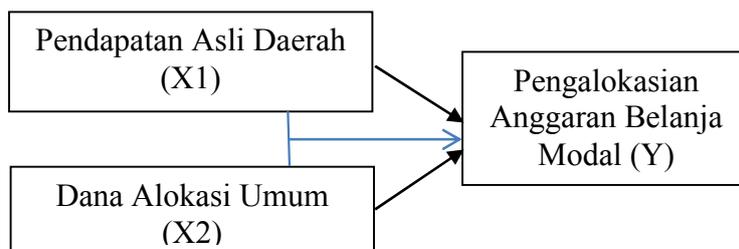
1. Penelitian yang mengukur pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di Kabupaten/ Kota di Bandung Raya (Guritno, Suzan, Umum, & Modal, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal.
2. Penelitian yang menganalisa tentang Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap

pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa timur (Heliyanto; Firnandi, 2015) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

3. Penelitian berjudul pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja daerah menemukan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah (JokoUntung, 2017)

Berdasarkan penjelasan teori dan konsep sebelumnya maka dapat di gambarkan kerangka konseptual penelitian berfikir sebagai berikut :

Gambar 1: Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Diduga pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
- H2 : Diduga dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal
- H3 : Diduga pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Pasaman Barat dengan objek penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua jenis yaitu :

1. Data primer, yaitu yang diperoleh secara langsung atau data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan APBD Pasaman Barat.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dengan cara mendapatkan dari instansi terkait di Pemerintah Daerah Pasaman Barat, referensi melalui literature buku, artikel ilmiah, hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung kepada objek-objek penelitian yaitu instansi Pemerintah Daerah Pasaman Barat.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik diperlukan sebagai syarat untuk pengujian pengaruh antar variabel terhadap variabel lainnya dengan regresi (Asraf, Lubis, & Erdawati, 2017). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisa regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang menurut (Ghazali, 2005) terdiri dari uji normalitas

data, uji linieritas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji Asumsi Klasik ini merupakan prasyarat bagi pengujian hipotesis dengan regresi linier. Adapun metode pengujian dilakukan sebagai berikut :

1. Normalitas data diuji dengan metode Kolmogrov-Smirnov. Data dinyatakan berdistribusi normal bila nilai asyim sig (2 tailed) $> 0,05$. Uji normalitas ini untuk menguji apakah sekelompok data yang diuji dan di analisa terdistribusi secara normal.
2. Uji linieritas dengan *Compare means*. Bila signifikansi linierity pada ANOVA table $< 0,05$ maka dinyatakan linier. Karena pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya yang diuji dengan regresi akan digunakan memprediksi, maka data-data yang diuji tersebut harus bersifat linier.
3. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF. Variabel independen dinyatakan terbebas dari masalah multikolinieritas bila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Beberapa variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen secara bersamaan walaupun juga ingin dilihat pengaruh secara parsial tidak boleh mempengaruhi satu sama lain secara signifikan. Oleh karena itu terlebih dahulu harus dilakukan Uji multokolinieritas.
4. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pada grafik Scatterplot. Bila data menyebar tanpa membentuk pola tertentu dan berada diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dinyatakan bebas dari masalah multikolinieritas.

Analisa Regresi Berganda

Tehnik pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisa regresi linier berganda.

Berdasarkan model penelitian dalam penelitian ini maka rumus persamaannya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

a = Konstanta

X_1 = PAD

X_2 = DAU

Y = Belanja Modal

e = variabel pengganggu.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pengaruh atau besarnya kontribusi variabel-variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen. Dalam analisa regresi diperlukan juga untuk melihat berapa persen dari variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh variasi dari variabel independen (Moh. Nasir, 2005). Untuk ini digunakan koefisien determinasi (R^2). Rentang koefisien R^2 adalah dari 0 s/d 1. Semakin koefisien R^2 mendekati angka 1 maka pengaruh variabel independen semakin besar terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa besar porsi variabel-variabel independen yang diteliti dalam mempengaruhi variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F adalah untuk menguji apakah variabel-variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2009). Uji F yang merupakan uji simultan dimaksudkan untuk menguji apakah model penelitian yang dikembangkan memiliki kelayakan untuk dilanjutkan pada uji hipotesis secara parsial. Model penelitian harus layak berdasarkan pengujian ini agar dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis (uji t).

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Widarjono, 2010). Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji diterima atau tidaknya hipotesis secara parsial, yaitu untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal di Kabupaten Pasaaman Barat adalah data yang diteliti. Adapun data-data dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Anggaran Belanja Modal di Kabupaten Pasaman Barat

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rupiah)	Dana Alokasi umum (DAU) (Rupiah)	Belanja modal (Rupiah)
2012	32.493.954.054	457.694.684.000	150.888.247.379
2013	36.826.530.932	523.534.850.000	153.342.778.023
2014	69.925.195.482	580.406.954.000	193.092.373.454
2015	69.128.838.735	611.155.638.000	193.334.659.071
2016	91.174.717.113	655.854.990.000	267.700.818.987

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pasaman Barat, 2017.

Terhadap data-data diatas akan dilakukan pengujian hipotesis sebagaimana telah disebut sebelumnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi linier berganda. Karena menggunakan metode regresi, maka data-data harus dilakukan uji Asumsi Klasik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Data dinyatakan normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS menunjukkan semua data memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga dinyatakan semua data berdistribusi normal.

Uji Linieritas

Uji linieritas dengan melihat pada hasil PP-Plot menunjukkan data membentuk garis lurus mengikuti garis linier, sehingga data dinyatakan bersifat linier.

Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Runt Test. Jika nilai Asymp.Sig. (2 tailed) $<$

dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi, sebaliknya jika nilai Asymp.Sig. (2 tailed) $> 0,05$ maka tidak terdapat autokorelasi. Dari hasil pengolahan data diatas terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,326 atau $> 0,05$. Dengan demikian data dinyatakan terbebas dari masalah auto korelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Wibowo (2011) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Jika tidak ada pola yang jelas, serta data menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan regresi linier berganda melalui bantuan program SPSS versi 16 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Analisa Regresi Linear Berganda

Variabel	B	T	Sig	Ket
Konstanta	126.328	.657	.578	
PAD	2.131	1.388	.299	Tidak signifikan
DAU	-.110	-.224	.843	Tidak signifikan
Koefisien Determinasi (R^2)	0.894			
Nilai F	8.399			
Sgnifikan F	0.106			

Sumber : data diolah (2019)

PEMBAHASAN

Dari serangkaian hasil dari pengolahan data diatas, uji Asumsi Klasik menunjukkan hasil bahwa pengujian dengan regresi linier berganda sudah memenuhi syarat.

Dari hasil pengujian regresi linier berganda terlihat bahwa sumber dana pada APBD Kabupaten Pasaman Barat yang berasal dari Pendapatan Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijaksanaan belanja modal. Meskipun PAD memiliki koefisien yang besar, namun karena tidak signifikan memberikan gambaran bahwa kebijaksanaan belanja modal tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya perolehan sumber dana dari PAD. Seolah-olah kebijaksanaan pengadaan barang modal adalah berdiri sendiri dan keputusannya tidak didasarkan pada perolehan PAD. Kalau ditelusuri lebih jauh proses pengambilan keputusan pengadaan barang modal seperti infrastruktur lebih banyak ditentukan oleh hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang berproses dari tingkat bawah yaitu dimulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Didalam penyusunan anggaran yang lebih mengutamakan hasil Musrenbang, terlihat disini bahwa perolehan Pendapatan Asli Daerah tidak menjadikan pertimbangan. Selain faktor Musrenbang, dapat diduga bahwa telah terjadi tarik menarik kepentingan dengan kekuatan politik dimana seorang anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat akan berusaha untuk memenuhi permintaan barang infrastruktur di wilayah pemilihan yang memenangkannya.

Akan halnya Dana Alokasi Umum juga tidak memiliki pengaruh bagi kebijakan pengadaan barang modal di Kabupaten Pasaman Barat. Sebagaimana diketahui kebijakan penggunaan dana DAU sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal ini kebijakan pengadaan barang modal Pemerintah Daerah nampaknya selain berdasarkan Musrenbang dan tekanan politik dari kekuatan politik daerah, juga sangat terkait dengan kebutuhan belanja non barang modal yang sangat dinamis. Faktor kebutuhan pembiayaan yang bersifat prioritas dan darurat seringkali menyedot dana yang cukup besar. Karena faktor ini tuntutananya tidak selalu sama dari periode ke periode anggaran maka besarnya juga berubah-ubah. Kompleksnya kebutuhan dana diluar kebutuhan pengadaan barang modal nampaknya turut memberi andil tidak signifikannya pengaruh DAU terhadap kebijaksanaan pengadaan barang modal.

Selanjutnya apabila dilihat dari kontribusi PAD dan DAU bagi pengadaan Barang Modal

terlihat cukup besar yaitu sebesar 89,4% yang berarti bahwa sumber dana pengadaan barang modal mayoritas dipenuhi dari PAD dan DAU. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan diberbagai daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Universitas Diponegor O*.
- Asraf, Lubis, S., & Erdawati. (2017). Religiosity Moderation on the Effect of Sharia Label Equity in. *UNES Journal of Social and Economics Research*, 2(1), 72–84. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Darwanto, & Yustikasari, Y. (2006). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi X. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Ghazali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Guritno, A., Suzan, L., Umum, D. A., & Modal, B. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN / KOTA DI BANDUNG RAYA TAHUN 2008-2013 THE INFLUENCE OF OWN-SOURCE REVENUE, AND GENERAL ALLOCATION FUND FOR CAPITAL EXPENDITURE DISTRICTS / CITIES ON UNITED BAND, 2(2), 1675–1682.
- Halim, A. (2008). *Akutansi Keuangan Daerah* (Edisi Ketu). Jakarta: Salemba Empat.
- Heliyanto; Firnandi. (2015). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Pada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur. *STIESIA*. Retrieved from file:///C:/Users/X441U/Downloads/Document/7874-30724-1-PB.pdf

- JokoUntung, T. (2017). pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja daerah menemukan bahwa Pendapatan asli daerah. *JurnalIlmiahWIDYAEkonomika*, 1(2). Retrieved from file:///C:/Users/X441U/Downloads/Documents/54987-ID-pengaruh-pendapatan-asli-daerah-dana-alo.pdf
- Keefer, P., & Khemani, S. (2003). Democracy, Public Expenditures, and the Poor. *World Bank Policy Research Working Paper*, 20(June 2003), 1–27. <https://doi.org/10.1093/wbro/lki002>
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Cetakan ke). Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2010). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moh. Nasir. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyawan, R. (2017). *Administrasi Keuangan* (Cetakan Ke). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekarwo. (2003). *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Widarjono, A. (2010). *Analisis Multivariate Terapan* (Kedua). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.